

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan konsinyasi atau penitipan uang di Pengadilan merupakan bagian dari proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Spesifiknya terdapat pada proses pemberian ganti kerugian terhadap masyarakat yang berhak atau yang tanahnya menjadi obyek pembangunan untuk kepentingan umum. Hal tersebut berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Pelaksanaan penitipan uang di Pengadilan Negeri atau konsinyasi dilakukan jika terdapat pihak yang berhak menolak kemudian pihak yang berhak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Klaten. Tata cara konsinyasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Salinan Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pihak yang berhak tersebut adalah warga yang beralamatkan di Desa Pepe, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten melakukan penitipan uang ganti kerugian di Pengadilan Negeri Klaten karena hingga saat ini merasa ganti kerugian tersebut tidak sesuai dengan besaran yang di dapat akibat ganti kerugian dari lahan yang digunakan

sebagai obyek pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Kabupaten Klaten.

B. Saran

Musyawahar penetapan ganti kerugian menjadi permasalahan awal dilakukannya permohonan keberatan dan konsinyasi di Pengadilan Negeri Klaten. Masyarakat menilai musyawarah ialah diskusi bersama antara pihak yang berhak dan Panitia pengadaan tanah mengenai penentuan besaran ganti kerugian, namun dalam praktek yang dilaksanakan hanyalah dari Panitia pengadaan tanah yang menerangkan dan memberikan informasi mengenai penetapan ganti kerugian. Sehingga banyak masyarakat yang menolak besaran ganti kerugian tersebut. Dari permasalahan tersebut, diperlukan penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai makna dari musyawarah itu sendiri, kemudian apabila dalam pelaksanaan memiliki waktu yang cukup lama, maka musyawarah dilakukan dengan berdiskusi yang dilakukan antara pihak yang berhak dan Panitia pengadaan tanah . Oleh karena itu, akan meminimalisir pelaksanaan penitipan uang di Pengadilan dan masyarakat mendapatkan ganti kerugian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aartje Tehupeiory, 2017, “Makna Konsinyasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Adrien Sutedi, 2008, *Implementasu Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Benhard Limbong, 2015, *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Cetakan keenam, Sinar Grafika, Jakarta.
- Boedi Harsono 2009, *Hukum Agraria Indonesia, sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Gunanegara, 2008, *Rakyat dan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Tata Nusa, Jakarta.
- Jarot Widya Muliawan, 2016, *Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Litera, Yogyakarta.
- Maria S.W Sumardjono, 2017, *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia dari Keputusan Presiden sampai Undang-undang*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Suyanto, 2023, *Hukum Pengadaan dan Pendaftaran Tanah*, Unigres Press, Gresik
- Suyanto, 2020, *Hapusnya Hak Atas Tanah Akibat Penitipan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Jakad Media, Gresik.
- Urip Santoso, 2015, *Perolehan hak atas tanah*, Cetakan ke-1, Prenamedia, Jakarta Timur.
- Winahyu Erwiningsih, 2013, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Total Media, Yogyakarta.

Jurnal dan Internet

- Abuyazid Bustomi, 2018, “*Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*”, dalam jurnal Solusi, Vol 16 No 3, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang.
- Afifah Rahma Nurdifa, *Jasa Marga: Tol Solo-Yogyakarta Seksi 1.1 Ditargetkan Rampung Akhir 2023*, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230413/45/1646731/jasa-marga-tol-solo-yogyakarta-seksi-11-ditargetkan-rampung-akhir-2023>, diakses pada 18 Mei 2023.
- Benhard Limbong, 2015, *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Cetakan keenam, Sinar Grafika, Jakarta Oloan Sitorus, Carolina Sitepu, Herawan Sauni, 1995, *Pelepasan atau Penyerahan Hak Sebagai Cara Pengadaan Tanah*, Dasamedia Utama, Jakarta.

BPK RI, 2019, *Tahapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum*, https://sumsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/04/1.-Tulisan-Hukum-Tahapan-Pengadaan-Tanah_edit.pdf diakses pada tanggal 9 Oktober 2023.

Estepanus Dauwole, Johannis Kaawoan, Yurnie Sendow, 2017, “*Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Tolabit Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara)*”, dalam Jurnal Eksekutif, Vol 2 No 2, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi.

Mia Permata Sari, Suteki, 2019 *Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Guna Pembangunan Bandar Udara Internasional Berbasis Nilai Keadilan Sosial*, dalam jurnal Notarius, Vol 12 No 1, jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Sunartono, *Pemilik Belum Setuju, Uang Ganti Rugi 8 Bidang Lahan Tol Jogja-Solo Rp10 Miliar Dtitipkan di Pengadilan*, <https://news.harianjogja.com/read/2023/02/13/500/1126089/pemilik-belum-setuju-uang-ganti-rugi-8-bidang-lahan-tol-jogja-solo-rp10-miliar-dtitipkan-di-pengadilan>, diakses pada 18 Mei 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885.

Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Salinan Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadmn Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 836.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 0337/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 16 Oktober 2023

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA
Jl. Klaten - Solo No.KM. 2, Peraksangkal, Jonggrangan, Kec. Klaten Utara, Kabupaten Klaten,
Jawa Tengah 57435
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguji internal.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Aditya Wahyu Ismail
2. Nomor Mahasiswa : 200513795
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Kabupaten Klaten, Jawa Tengah
5. Dosen Pembimbing I : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.
6. Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Pelaksanaan Konsinyasi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta Di Kabupaten Klaten
7. No. Handphone / WA : 088232439184

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.


Wakil Dekan I,
Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Tembusan :
- Arsip

Alamat
Kampus I Gedung Alfonso
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281
URL
<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak
Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id





FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 0338/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 16 Oktober 2023

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Klaten
. Jl. Veteran No.88, Borenglor, Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah
57438.
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguji internal.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Aditya Wahyu Ismail
2. Nomor Mahasiswa : 200513795
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Kabupaten Klaten, Jawa Tengah
5. Dosen Pembimbing I : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.
6. Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Pelaksanaan Konsinyasi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta Di Kabupaten Klaten
7. No. Handphone / WA : 088232439184

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Tembusan :
- Arsip

Alamat
Kampus I Gedung Alfonso
Jalan Mrican Baru 2B Yogyakarta 55281
URL
<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak
Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id





FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 0339/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 16 Oktober 2023

Kepada Yth.
Warga Desa Pepe
Kecamatan Ngawen, Klaten, Jawa Tengah 57466.
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguji internal.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Aditya Wahyu Ismail
2. Nomor Mahasiswa : 200513795
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Kabupaten Klaten, Jawa Tengah
5. Dosen Pembimbing I : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.
Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Pelaksanaan Konsinyasi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta Di Kabupaten Klaten
7. No. Handphone / WA : 088232439184

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.


Wakil Dekan I,
Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Tembusan :
- Arsip

Alamat
Kampus I Gedung Alfonsus
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281
URL
<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak
Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id



Lampiran 2 Dokumentasi Narasumber dan Responden



Hakim Pengadilan Negeri Klaten



Badan
Klaten
Pertanahan
Kabupaten



Kepala Desa Pepe



Responden 1



Responden 2



Responden 3